



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Pramintohadi Sukarno

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Budi Karya Sumadi

Jabatan : Menteri Perhubungan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Menteri Perhubungan

BUDI KARYA SUMADI

Pihak Pertama,  
Inspektur Jenderal

M. PRAMINTOHADI SUKARNO

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
INSPEKTORAT JENDERAL**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SP 1	Pengawasan intern yang memberikan nilai tambah	IKP 1	Dukungan pengawasan terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	Persentase	73,00
		IKP 2	Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	Persentase	83,00
SP 2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	IKP 3	Nilai Area Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Nilai	4,93
SP 3	Meningkatnya layanan pengawasan	IKP 4	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Audit	Persentase	88,00
		IKP 5	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	Level	3,00
		IKP 6	Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan	Persentase	81,00

**Kegiatan**

**Anggaran**

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal	Rp.	29.974.682.000,00
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM Pengawasan	Rp.	5.107.935.000,00
3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Pengawasan	Rp.	54.868.196.000,00
4. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan	Rp.	3.600.000.000,00
5. Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Pengawasan	Rp.	600.000.000,00
6. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pengawasan	Rp.	1.245.318.000,00
7. Legislasi dan Legitimasi Pengawasan	Rp.	1.250.000.000,00

Disetujui,  
Menteri Perhubungan

  
BUDI KARYA SUMADI

Jakarta, 19 Januari 2023

Inspektur Jenderal

  
M. PRAMINTOHADI SUKARNO